

## **PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENANGGULANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA**

*Bayu Prasetyo Mariono<sup>1</sup>*  
*Michael Mantiri<sup>2</sup>*  
*Frans Singkoh<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pengangguran bukan hanya menjadi masalah sebuah daerah, kota maupun negara, tetapi pengangguran sudah merupakan masalah global terlebih di negara-negara berkembang, semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan pengguna tenaga kerja baik itu pemerintahan, maupun swasta. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah baik berdasarkan penelitian di Dinas Tenaga Kerja maupun kepada masyarakat, walaupun dilihat dari data BPS bahwa tingkat pertumbuhan pengangguran di Kabupaten Minahasa setiap tahun mengalami peningkatan dimana tahun 2014 sebanyak 13.584 dan tahun 2015 sebanyak 14.513. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Dinas Tenaga Kerja karena pada dasarnya peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa.

**Kata Kunci: Peran Dinas Tenaga Kerja, Angka Pengangguran.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pengangguran yang tinggi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan persoalan-persoalan social politik yang semakin meningkat. Dengan arus migrasi yang terus mengalir, dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, serta jumlah angkatan kerja yang cukup besar membuat persoalan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Pengangguran bisa mengurangi pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemakmuran suatu Negara. Tingginya angka pengangguran dapat mengakibatkan banyaknya sumber daya manusia yang terbuang dan bisa menyebabkan turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang tinggi ini dapat menyebabkan kerugian yang besar baik itu bagi Negara maupun masyarakat. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 5,01%, posisi ini melaju jauh diatas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5%, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi saat ini tidak mampu menjadi solusi masalah Pengangguran di Indonesia.

Di Kabupaten Minahasa terdapat banyak sektor-sektor yang bisa menghasilkan pendapatan masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, terutama dikalangan anak muda. Factor eksternal masalah pengangguran juga akibat pengaruh social budaya, contohnya

setiap keluarga masih mempertahankan tradisi kepada anak-anaknya yang telah lulus dari perguruan tinggi untuk bekerja sebagai karyawan kantor di instansi pemerintah ataupun swasta. Akibatnya, apabila seorang anak keluarga yang berprofesi sebagai petani telah menjadi sarjana dan belum mendapat pekerjaan, maka anak tersebut dianggap menganggur. Padahal sector pertanian di Kabupaten Minahasa masih terbuka lebar dalam memperluas lapangan pekerjaan. Dengan mengikuti jaman yang semakin modern dan tuntutan hidup, banyak anak muda sekarang yang telah lulus SMA maupun Perguruan tinggi tidak mau berprofesi sebagai petani, hanya karena mereka masih berpegang teguh pada prinsip "Gengsi". Jika persoalan mengenai masalah pengangguran yang demikian rumit dibiarkan berlarut-larut maka sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis social. Yang terjadi tidak saja berdampak pada para pencari kerja yang baru lulus sekolah, melainkan juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan karena kantor dan pabriknya tutup.

Pengangguran memang tidak dapat dihapuskan secara total dalam waktu singkat, tetapi setidaknya dapat ditekan sehingga keadaan perekonomian dapat stabil. Untuk mengatasi persoalan pengangguran ini maka sangat diperlukan peran pemerintah, karena pemerintah memberi pengaruh besar terhadap masalah pengangguran yang ada. Melihat dampak yang ditimbulkan dari masalah pengangguran yang dapat mengakibatkan perekonomian suatu daerah terganggu.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Soerjono Soekanto (2013:212-213) peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dan menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Levinson dalam Soekanto (2013:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. (Sadono Sukirno, 2015:327). Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sadono Sukirno, 2015: 328-330) :

1. Pengangguran normal atau friksional  
Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau

tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

2. Pengangguran siklikal  
Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat

ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaanya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

### 3. Pengangguran struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerostan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negaranegara lain. Kemerostan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

### 4. Pengangguran teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan

kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok (Sadono Sukirno, 2015: 330-331):

#### 1. Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

#### 2. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang

dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

### 3. Pengangguran bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

### 4. Setengah menganggur

Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan

jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk kegiatan

- ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan Keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi.
  4. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah :
    - a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan.
    - b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.
    - c. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah.

## Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskripsi kualitatif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Andi Prastowo, 2012:22). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian keadaan objek yang diteliti. Data yang dikumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2009:15).

Sugiyono (2010:216) menyatakan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru penelitian. Oleh sebab itu, istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini peneliti mengambil teknik Purposive Sampling, yang berpegang pada pendapat Sugiyono (2011:96) "Purposive Sampling" adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan tujuan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian yaitu:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa
2. Masyarakat yang Menganggur (2 Orang)
3. Wirausaha Baru (1 Orang)

Fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. Mengenai peranan ini, Suharto (2006:32), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan prefensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsumen dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan

toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

## Hasil Penelitian

Peran yang diputuskan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdiri dari Bab XVIII dan Pasal 193 dimana dijelaskan bahwa “pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang jabatan atau pekerjaan”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa bahwa mereka memiliki peran untuk menanggulangi angka pengangguran yaitu : dengan menciptakan tenaga kerja yang professional sesuai kebutuhan pasar dan terampil, serta menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjadi fasilitator untuk memberikan informasi pekerjaan bagi para pencari kerja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak VK selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa: “Perannya sangat strategis dalam menanggulangi pengangguran, karena bisa membantu masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, karena dengan menanggulangi pengangguran yang ada sekarang ini otomatis kemiskinan bisa berkurang.”

Untuk terciptanya tenaga kerja yang professional serta terampil, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas untuk melatih masyarakat yang tidak punya keahlian menjadi masyarakat yang berkeahlian. Dengan memberikan pelatihan dan keterampilan ini agar supaya dapat membentuk skill atau keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja sesuai yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau perusahaan, serta membantu menyerap jumlah pengangguran, dan juga agar para pencari kerja bisa mandiri dalam mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Berikut adalah Kutipan wawancara dengan Bapak VK selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa: “Maksudnya berkeahlian disini adalah keahlian bekerja. Target Dinas Tenaga Kerja adalah masyarakat Pengangguran contohnya : Ibu Rumah Tangga, Anak-anak yang putus sekolah maupun masyarakat yang minim pengetahuan tentang kerja. Dinas Tenaga Kerja merangkul para Penganggur-Penganggur diatas untuk dilatih dan diberi ilmu untuk menjadi Pekerja-Pekerja yang berkompeten maupun professional dibidangnya.”

Dinas Tenaga Kerja mengadakan Pelatihan-Pelatihan keterampilan kerja didalam lingkup Dinas maupun yang dilakukan diluar lingkup Dinas (Di desa-desa maupun Kecamatan) didalam lingkup Dinas ada beberapa Program Pelatihan kerja yang dilaksanakan contohnya : program-program Pelatihan seperti Pelatihan Otomotif, Jahit Menjahit, Salon/Bridal, Pengolahan hasil pertanian, dan Seni Kriya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak VK selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa: “Kami memberikan banyak pelatihan, contohnya di bidang otomotif kami mengadakan service-service motor, di bidang salon kami

mengadakan pelatihan gunting rambut. Dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ini secara terus menerus pastinya akan menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang terampil dan professional, dan otomatis para tenaga-tenaga kerja ini bisa menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha-usaha baru sehingga bisa banyak memberikan peluang bagi para pencari kerja atau yang sedang menganggur.”

Diluar lingkup Dinas ada juga beberapa Program Pelatihan kerja yang dilakukan di desa-desa seperti: Pembuatan Abon Ikan, Kerajinan tangan dari tempurung, dan kerajinan tangan dari eceng gondok. Berikut kutipan wawancara dari Ibu VM salah satu masyarakat yang mengikuti pelatihan di desa-desa. “Ya. Memang pelatihan-pelatihan itu sudah kami lakukan, seperti yang baru-baru ini, di desa Lalumpe memakai instruktur mengenai pengolahan pembuatan Abon Ikan cakalang, disitu khusus anak-anak yang putus sekolah, jadi kami dari para ibu-ibu rumah tangga yang memberikan pelatihan kemudian anak-anak kami yang putus sekolah yang membantu, jadi saya rasa ini bisa jadi salah satu usaha baru bagi para pengangguran.”

Informasi lowongan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh para pencari kerja, informasi yang banyak bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai minat yang dimiliki. Mencari informasi lowongan pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi dan bersosialisasi dengan berbagai kalangan dapat menambah referensi mengenai pekerjaan yang ingin dicari, oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja telah membuat situs untuk informasi pasar kerja agar bisa memperluas informasi pasar kerja demi meningkatkan produktivitas kerja dari



Dinas Tenaga Kerja dan juga dapat membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak VK selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa: “Kami sebagai fasilitator memberikan informasi melalui Job Fair, kami selalu meminta informasi-informasi dari perusahaan swasta kalau ada lowongan pekerjaan, informasi tersebut selalu kami sebarluaskan di internet maupun media massa seperti Koran.”

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa Peran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa untuk menanggulangi angka pengangguran sudah baik, dimana Dinas Tenaga Kerja sudah berusaha agar dapat menerapkan dan melaksanakan semua peran-peran mereka, sehingga produktifitas dari Dinas Tenaga Kerja cukup meningkat melihat dari beberapa masyarakat yang merespon dengan baik usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan focus penelitian dari teori Suharto (2006:32) mengenai Peran, Suharto mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut: Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam menanggulangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Minahasa yaitu Meningkatkan kualitas pencari kerja, dan Padat Karya Infrastruktur dan menciptakan Wirausaha-Wirausaha baru. Kebijakan yang pertama adalah Meningkatkan kualitas pencari kerja, ini sama halnya dengan peran diatas yaitu memberikan Pelatihan-pelatihan.

Meningkatkan kualitas dari para pekerja ini adalah untuk memperbaiki performa pekerja dalam suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawab atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Agar supaya efektif pelatihan-pelatihan ini biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas yang terencana. Berikut kutipan wawancara dari Bapak VK selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa: “Kami pertama meningkatkan kualitas pencari kerja, pencari kerja yang dalam arti ini yang menganggur, ini sama halnya dengan peran kami yaitu memberikan pelatihan agar mereka mempunyai skill atau keterampilan. Biasanya kalau kami memberikan pelatihan kepada satu orang otomatis dia akan memanggil orang lain untuk mengikuti pelatihan ini, sehingga mereka juga bisa menjadi wirausaha-wirausaha baru. Hasil dari kegiatan pelatihan itu sendiri sangat berdampak baik langsung terhadap tenaga kerja yang mendapat pelatihan, masyarakat yang mendapat bekal pelatihan pasti terdapat perubahan.”

Kebijakan yang Kedua adalah Padat Karya Infrastruktur. Padat karya merupakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah menganggur dan masyarakat miskin) melalui kegiatan pembuatan rehabilitasi infrastruktur sederhana maupun kegiatan produktif lainnya dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam rangka upaya meningkatkan produktifitas, aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Program Padat Karya Infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pekerjaan-pekerjaan fisik berupa pembangunan maupun perbaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten

Minahasa. Seperti yang dikatakan oleh salah Saudara VR salah satu masyarakat yang sedang menganggur: “sebagai masyarakat kami telah beberapa kali di ikut sertakan menjadi pekerja. Merehabilitasi gedung maupun kantor-kantoryang ada berupa perbaikan plafon, ,pergantian atap dll. Pernah juga kami memperbaiki jalan dan selokan bersama dinas Pekerjaan Umum yang tentunya telah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja”.

Selanjutnya yang dikatakan oleh VM selaku masyarakat Wirausaha Baru: ”saya merasa sangat terbantu oleh pelatihan-pelatihan serta motivasi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Hasilnya sudah beberapa bulan ini Produk olahan Abon Ikan cakalang yang saya produksi laris dipasarkan, terlebih juga saya bisa mempekerjakan saudara-saudara saya yang menganggur untuk bekerja bersama saya membuat abon cakalang ini.” Berdasarkan hasil Pembahasan dan hasil penelitian diatas dapat dilihat kebijakan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja sudah cukup baik, dimana kebijakan untuk meningkatkan kualitas pencari kerja, serta untuk memunculkan wirausaha-wirausaha baru telah berhasil dilaksanakan di beberapa tempat. Masyarakat juga merespon positif tentang kebijakan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja.

## Kesimpulan

1. Peran sebagai suatu kebijakan, kebijakan yang dibuat dalam meanggulangi pengangguran sudah baik dapat dilihat dari kualitas para pencari kerja yang mengikuti pelatihan dilingkup Dinas Tenaga Kerja juga telah berhasil memunculkan wirausaha-wirausaha baru.
2. Peran sebagai strategi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk menanggulangi masalah pengangguran sudah baik, karena sudah ada beberapa masyarakat yang merasakan langsung dampak positif dari pelatihan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja.

3. Peran sebagai alat komunikasi, komunikasi yang dibangun antara Dinas Tenaga Kerja dan masyarakat belum sesuai yang diharapkan , hal ini dibuktikan dari pelaksanaan sosialisasi yang belum bisa dilaksanakan di seluruh desa-desa yang berpotensi memunculkan wirausaha-wirausaha baru.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa atau masalah antara pekerja dan pemilik perusahaan yang menjadi salah satu tugas dari Dinas Tenaga Kerja belum berjalan baik. Karena sampai saat ini belum ada masalah yang dilaporkan atau diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja. Penyebabnya karena pekerja tidak mengetahui tentang salah satu tugas Dinas Tenaga Kerja ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang tugas Dinas Tenaga Kerja.
5. Peran sebagai alat terapi, alat terapi yang digunakan untuk mengobati ketakutan para penganggur ketika belum mendapatkan pekerjaan sudah cukup baik. Pengembangan kompetensi maupun skill di beberapa bidang pekerjaan melalui Pelatihan-pelatihan berjalan dengan baik.

## Saran

1. Untuk Dinas Tenaga Kerja harus lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi mengenai pelatihan-

pelatihan maupun sosialisasi terkait tugas-tugas Dinas Tenaga Kerja, dalam hal ini sosialisasi dilakukan di Desa-Desa yang strategis dan potensial, agar tercipta wirausaha-wirausahawan baru sehingga pengangguran dapat tertanggulangi. Dinas Tenaga Kerja juga harus berusaha membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan baik itu milik pemerintah maupun milik swasta, agar supaya para penganggur bisa mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja.

2. Untuk masyarakat yang menganggur harus aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam bertanya, memberikan masukan maupun saran kepada Dinas Tenaga Kerja. Penganggur juga harus lebih banyak berusaha mencari pekerjaan juga perbanyak berdoa agar yang menjadi harapan para penganggur yaitu "Bisa Bekerja" bisa terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Andi, Prastowo. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press.
- Iskandar. 2010. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2015. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 2000. Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Balai Latihan Kerja
- Undang-Undang Dasar 1945
- UU RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan.